

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN FORWARDLOOKING INFORMATION

IRMA NOVIA¹ NIKI LUKVIARMAN²
ERNA SETIANY³(erna.setiany@mercubuana.ac.id)

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³ Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study investigated the influence of corporate governance on the disclosure of forward-looking information. The study's secondary data was collected from the annual report of consumer goods industry manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange for 2017-2019 using the purposive sampling technique, and 122 annual reports were obtained as the research sample. Model Analysis in this research is multiple linear regression analysis models. The results of this study showed that the board size and the frequency of audit committee meetings have a positive and significant effect on the disclosure of forward-looking information. The proportion of independent audit committees has a negative and significant effect on the disclosure of forward-looking information. The proportion of board independence, public ownership, and audit quality have no significant effect on the disclosure of forward-looking information.

Keywords: corporate governance, disclosure, forward-looking information.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *forward-looking information*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019, dengan teknik *purposive sampling* didapatkan 122 laporan tahunan sebagai sampel penelitian. Untuk pengujian hipotesis, peneliti menggunakan model analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*, proporsi komite audit independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information* dan proporsi komisaris independen, kepemilikan publik, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*. **Kata kunci:** corporate governance, pengungkapan, *forward-looking information*.

PENDAHULUAN

Tiga tahun terakhir jumlah investor di industri pasar modal Indonesia terus meningkat, yang ditandai dengan peningkatan *Single Investor Identification* (SID). Pada tahun 2017 jumlah *Single Investor Identification* (SID) tercatat 1.122.668 SID, pada tahun 2018 tercatat 1.617.367 SID sehingga terjadi peningkatan jumlah SID sebesar 44% pada tahun 2018 dari tahun 2017 (Kompas.com, 2018). Pada tahun 2019 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor sebanyak

2.480.000 SID, jumlah ini mengalami pertumbuhan 53% dibandingkan tahun 2018 (Kompas, 2020). Peningkatan investor ini dapat diartikan meningkatnya kebutuhan informasi bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Sehingga kebutuhan investor ini memerlukan *supply* informasi yang memadai dari perusahaan, salah satu yang relevan adalah *forward-looking information*. Namun demikian hasil studi

Price Waterhouse Coopers

(2007) memperlihatkan bahwa keengganan perusahaan mengungkap lebih banyak *forward-looking information*. Studi ini mengungkap kekhawatiran perusahaan bahwa pengungkapan *forward-looking* akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi yang sensitif sehingga merugikan perusahaan dalam memenangkan persaingan, atau mengekspos diri mereka pada ancaman litigasi. Namun pengungkapan *forward-looking* melengkapi data historis perusahaan meningkatkan *decision usefulness* dari laporan keuangan (Buertey & Pae, 2020).

Pengungkapan informasi yang diwajibkan oleh regulator pasar belum mampu memuaskan kebutuhan investor sehingga perusahaan perlu untuk mengungkapkan informasi tambahan secara sukarela (Oktriani & Arza, 2018). Informasi tambahan sukarela dimaknai sebagai pengungkapan sukarela, dimana pengungkapan ini merupakan upaya perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Pengungkapan sukarela diberikan oleh perusahaan diluar item-item yang diwajibkan untuk diungkapkan sesuai dengan kebijakan perusahaan guna memberikan informasi yang lebih relevan serta meningkatkan kinerja perusahaan di bursa saham (Sunyoto & Hidayanti, 2009).

Pada penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai pengungkapan *forward-looking information* yang merupakan bagian dari pengungkapan sukarela. Pengungkapan *forward-looking information* merupakan kategori informasi mengenai prakiraan masa depan yang memungkinkan para pengguna laporan tahunan dapat menilai kinerja masa depan perusahaan, hal ini termasuk rencana manajemen, evaluasi peluang dan risiko, dan data perkiraan tentang operasional perusahaan (Menicucci, 2013).

Pengungkapan ini diperlukan karena laporan keuangan yang merupakan hasil dari proses akuntansi memuat informasi bersifat historis mengenai kinerja perusahaan yang telah dicapai oleh manajemen (Utami, Wahyuni & Nugroho, 2020). Sedangkan keadaan ekonomi semakin dinamis sehingga informasi yang

bersifat historis dianggap kurang relevan untuk memenuhi kebutuhan investor sejalan dengan perkembangan ekonomi (Muliawati dan Rohman, 2019). Karena informasi historis pada laporan tahunan dianggap tidak cukup bagi pihak eksternal dalam pemenuhan kebutuhan informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, maka perusahaan perlu menambahkan pengungkapan *forward-looking information* pada laporan tahunan (Mardani & Kristanto, 2020).

Berdasarkan penelitian Maghfira & Tresnaningsih (2018), rata-rata pengungkapan *forward-looking information* selama periode 2012-2013 pada perusahaan manufaktur di Indonesia hanya 32,6%. Pada penelitian Utami & Wahyuni (2018), tingkat rata-rata pengungkapan *forward-looking information* adalah 48,76% pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2015-2016. Berdasarkan kedua penelitian tersebut dapat dikategorikan bahwa pengungkapan *forward-looking information* di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini mengingat berdasarkan kedua penelitian terdahulu di Indonesia terlihat bahwa tingkat pengungkapan sejak tahun 2012-2016 masih di bawah 50% dari tingkat pengungkapan optimal yang ideal.

Pengungkapan *forward-looking information* yang masih rendah, menurut Aljifri & Hussainey (2007) disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu yang pertama, karena ketidak pastian terkait masa depan sehingga menyebabkan kesulitan dalam memprediksi secara akurat. Kedua, prakiraan yang tidak akurat dapat menyebabkan risiko litigasi sehingga manajer mengurangi pengungkapan dalam memberikan pengungkapan informasi masa depan, dimana manajer percaya bahwa sistem hukum tidak membedakan antara kesalahan perkiraan yang bisa terjadi akibat ketidakpastian atau bias manajemen yang disengaja. Ketiga, pengungkapan *forward-looking information* mungkin memberikan informasi yang berguna kepada pesaing dan hal ini dapat memengaruhi posisi kompetitif perusahaan di pasar. Ketiga kondisi tersebut mencerminkan tekanan risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengungkap *forwardlooking information*.

Kılıç & Kuzey (2018) menyatakan bahwa dalam menyajikan informasi mengenai keuangan dan nonkeuangan perusahaan cenderung menyampaikan informasi secara kualitatif, bukan kuantitatif dengan adanya tekanan risiko litigasi maka pada perusahaan yang dapat memberikan lebih banyak pengungkapan *forward-looking information* secara kuantitatif akan membuat pengguna laporan tahunan lebih yakin terhadap informasi yang disampaikan dan mempercepat dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Pengungkapan *forward-looking information* berkualitas terkait dengan aspek lain yaitu *corporate governance* yang merupakan mekanisme pengawasan terhadap perilaku manajemen (Muliawati & Rohman, 2019). Menurut (Lukviarman, 2004) *corporate governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang benar. *Corporate governance* menggambarkan bagaimana cara perusahaan diarahkan dan dikendalikan untuk kepentingan terbaik para pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham (Agyei-Mensah, 2017).

Corporate governance mendapat perhatian lebih sejak runtuhnya Enron (AlNajjar & Abed, 2014). Sistem *corporate governance* yang lemah dan kurangnya pengungkapan dari pihak perusahaan adalah beberapa alasan mengapa krisis keuangan pada tahun 1997-1998 berdampak parah pada perusahaan terutama di negara-negara Asia (Dzaraly, Lokman & Othman, 2018). Dari kejadian tersebut, hal ini meningkatkan tekanan pada perusahaan untuk membangun lingkungan *corporate governance* yang kuat untuk melindungi hak dari pemegang saham dari tindakan manajer yang berpeluang untuk mementingkan kepentingan pribadi mereka.

Jika perusahaan memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik, maka perusahaan dapat menyajikan pengungkapan *forward-looking information* yang berkualitas dan terhindar dari bias informasi sehingga dapat mengurangi asimetri informasi. Menurut Ajibola (2017), motif utama pengungkapan *forward-looking information* untuk menutupi celah asimetri informasi

perusahaan dengan pemangku kepentingan, dengan adanya pengungkapan *forward-looking information* akan memberikan fakta tentang kinerja masa depan kepada pemangku kepentingan untuk evaluasi mereka. *Corporate governance* memfasilitasi pembentukan strategi pengungkapan yang unggul, memungkinkan manajer untuk memberikan realistikitas bisnis kepada pemegang saham melalui pengungkapan yang lebih besar seperti *forward-looking information* sehingga menghindari asimetri informasi terkait dengan hubungan *principal-agent* (Buertey & Pae, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *forward-looking information* masih sangat minim di Indonesia. Penelitian serupa ini lebih banyak dilakukan oleh negara maju. Salah satu referensi utama penelitian ini adalah penelitian Ajibola (2017), namun demikian sejumlah penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan dengan konteks Indonesia. Beberapa perbedaan penelitian ini dengan Ajibola (2017) adalah mengganti pengukuran pengungkapan berdasarkan Kılıç & Kuzey (2018), yang lebih komprehensif karena menyertakan informasi kualitatif dalam indeksnya.

Perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian Ajibola (2017) adalah dalam *context* budaya dan sistem hukum antara Indonesia dan Nigeria. Perbedaan sistem hukum ini merupakan poin penting yang belum dibahas dalam penelitian Ajibola (2017) dalam penelitiannya. Perbedaan sistem hukum berkonsekuensi pada perbedaan model *corporate governance*. Penelitian Ajibola (2017) mengikuti model *anglo-saxon* dengan menggunakan sistem dewan tunggal (*one-tier board system*) dimana dalam model ini hanya terdapat *board of director* sebagai dewan tunggal. Sedangkan Indonesia mengikuti model *continental european* dengan menggunakan sistem dewan dua tingkat (*two-tier board system*) yaitu adanya dewan komisaris (*supervisory board*) yang terpisah dengan direksi (*management board*).

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena pengungkapan

forwardlooking information yang tergolong dalam pengungkapan sukarela. Dalam menulis pernyataan *forward-looking information* tidak terdapat aturan baku berdasarkan aturan regulator tentang bagaimana perilisannya sehingga perilsan tersebut sesuai dengan kebijaksanaan manajerial perusahaan. Menurut Buertey & Pae (2020), diberikannya pengungkapan diskresi kepada manajer dalam pengungkapan *forward-looking information* dapat mengarah kepada pengungkapan informasi positif, atau sebaliknya menjadi kurang transparan mengenai kondisi perusahaan dan menyebabkan bias informasi yang didapatkan pengguna laporan tahunan. Pengungkapan sukarela dapat dikaitkan dengan motivasi manajemen yang mendasari pengungkapan tersebut. Salah satunya disampaikan oleh Utami & Wahyuni (2018) yang menyatakan bahwa manajemen ingin memberikan informasi privat ketika informasi belum menjadi kewajiban (wajib), dan perusahaan yang memiliki kualitas laba yang lebih baik (penghasilan persisten) cenderung memberikan lebih banyak informasi berwawasan ke depan.

Dengan demikian penelitian ini merumuskan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan *forward-looking information* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Indonesia. Adapun *corporate governance* dalam penelitian ini diproksikan menjadi ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, proporsi komisaris independen, proporsi komite audit independen, kepemilikan publik, dan kualitas audit.

Artikel ini terdiri dari beberapa poin utama, diawali dengan pendahuluan kemudian dilanjutkan bagian kedua menjabarkan teori untuk menghipotesiskan hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi *forward-looking information*; bagian ketiga menjabarkan metode penelitian; bagian keempat menjabarkan analisis data dan pembahasan; bagian kelima menyajikan simpulan, keterbatasan, dan saran.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), menyatakan bahwa manajer merupakan agen yang ditugaskan/didelegasikan oleh prinsipal selaku pemilik perusahaan. Hal ini kemudian memicu adanya konflik kepentingan di antara kedua belah pihak. Kondisi ini dapat dilihat dari perusahaan besar yang tergabung dalam bursa efek. Pemegang saham perusahaan yang tergabung dalam bursa efek tidak dapat melakukan pengawasan terhadap perilaku manajer perusahaan secara langsung. Para investor mengandalkan informasi yang disajikan manajer dan pengawasan oleh dewan komisaris beserta atributnya. Dengan demikian muncul potensi asimetri informasi di antara investor dan manajer. Menurut Utami *et al.* (2020), informasi asimetri adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perolehan informasi antara manajemen sebagai penyedia informasi dan pemegang saham dan pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi. Scott & O'Brien (2019) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis informasi asimetri, yaitu: (i) seleksi yang merugikan, yaitu manajer dan orang dalam lainnya biasanya tahu lebih banyak tentang kondisinya dan prospek

perusahaan daripada investor luar dan fakta yang dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham manajer untuk tidak mengungkapkan informasi kepada pemegang saham; (ii) *moral hazard*, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh manajer tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham atau pemberi pinjaman.

Pengungkapan *Forward-Looking Information*

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dapat dibagi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) (Setiawan, 2017).

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi-informasi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, sedangkan pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan (Nugraheni, 2018). Untuk perilsan pengungkapan wajib diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016.

Menurut Choi & Meek (2008) pengungkapan *forward-looking information* ini merupakan pertimbangan tinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. Pengungkapan *forward-looking information* adalah kategori informasi mengenai prakiraan masa depan yang memungkinkan pengguna untuk menilai kinerja masa depan perusahaan, hal ini termasuk rencana manajemen, evaluasi peluang dan risiko, dan data perkiraan tentang operasional perusahaan (Menicucci, 2013).

Pengungkapan *forward-looking information* disajikan pada beberapa bagian laporan tahunan perusahaan yaitu pada bagian laporan direksi, laporan dewan komisaris, diskusi dan analisis manajemen (Maghfira & Tresnaningsih, 2018). Ada berbagai istilah atau kata kunci yang dicantumkan dalam laporan tahunan yang merepresentasikan *forward-looking*

information beberapa istilah seperti mungkin, memprediksi, mengharapkan, meramalkan, memperkirakan, berharap, periode yang akan datang (Alkhatib, 2014).

Menurut Choi & Meek (2008) istilah *forward-looking information* meliputi (1) perkiraan pendapatan, laba (rugi), arus kas, pengeluaran modal dan hal-hal keuangan lainnya; (2) tujuan informasi mengenai kinerja dan posisi ekonomi masa depan yang tidak menentu daripada perkiraan menyangkut proyek, periode fiskal dan proyeksi jumlah; dan (3) laporan program dan sasaran manajemen untuk usaha masa depan. Secara umum kategori informasi dari *forward-looking information* yaitu (1) perkiraan, (2) informasi potensial, dan (3) sasaran dan tujuan.

Forward-looking information memberikan pemaparan tentang kinerja masa depan mereka kepada pemangku kepentingan (Ajibola, 2017). Menurut Dzaraly *et al.* (2018) investor lebih tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan yang mengungkapkan lebih banyak informasi secara sukarela dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat pengungkapan sukarela yang rendah sehingga perusahaan memilih mengungkapkan *forward-looking information* untuk meningkatkan kepercayaan investor dan kredibilitas perusahaan di mata pemangku kepentingan (*shareholder*).

Corporate Governance *Corporate governance* merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai perangkat atau kelembagaan serta aturan main (*code of conduct*) dan hukum yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan (*checks and balances*) agar sistem dapat bekerja secara optimal (Lukviarman, 2004). *Corporate governance* ada sejak entitas mulai dibentuk dan terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol entitas. Dengan adanya pemisahan ini, maka diperlukan mekanisme untuk menjamin bahwa manajemen (*agent*) yang merupakan orang gajian pemilik modal (*principal*) akan mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik (Lukviarman, 2004).

Berdasarkan pedoman umum *good corporate governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional

Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006) prinsip dasar *corporate governance* yang harus diterapkan perusahaan dalam setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Salah satu prinsip dasar *corporate governance* yaitu transparansi, bertujuan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis sehingga perusahaan harus menyediakan informasi material dan juga relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) (KNKG, 2006).

Penerapan *corporate governance* yang baik untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan tahunan, sehingga akan cenderung mengungkapkan pengungkapan *forward-looking information* (Al-Najjar & Abed, 2014). Menurut Sunyoto & Hidayanti (2009), bahwa pengungkapan mempunyai hubungan yang signifikan dalam mengurangi asimetri informasi. Melalui pengungkapan yang lebih banyak seperti pengungkapan *forward-looking information*, perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent* (Buertey & Pae, 2020).

Dalam pelaksanaannya sistem *corporate governance* dijalankan oleh sebuah mekanisme. Mekanisme *corporate governance* ialah mekanisme yang mengontrol dan mengawasi kegiatan perusahaan serta mengambil tindakan korektif ketika perusahaan keluar dari jalur seharusnya (Dzaraly *et al.*, 2018). Maka dalam penerapannya, dibutuhkan seperangkat aturan main yang jelas agar berbagai perangkat organisasi dalam sebuah sistem dapat menjalankan fungsinya untuk menjamin terjaganya kepentingan berbagai pihak yang berhubungan dengan perusahaan (Lukviarman, 2004).

Menurut teori agensi, perusahaan dengan biaya agensi yang tinggi akan berusaha mengurangi biaya agensi tersebut dengan meningkatkan pengungkapan

sukarela dan menggunakan perangkat pemantauan intensif sebagai pengawas dengan kehadiran dewan komisaris independen (Agyei-Mensah, 2017). Berdasarkan teori ini, maka perusahaan akan meningkatkan pengungkapan *forward-looking information* agar dapat mengurangi asimetri informasi dan biaya agensi (Hassanein & Hussainey, 2015).

Ukuran Dewan Komisaris dan Pengungkapan *Forward-Looking Information*

Ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan berasal dari internal atau eksternal perusahaan atau yang independen dalam suatu perusahaan (Fatmawati, Astuti & Suhardjanto, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Agyei-Mensah (2017) menunjukkan pengaruh positif dimana fungsi dewan komisaris ialah melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen, maka dengan meningkatkan jumlah anggota dewan komisaris dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan manajemen. Pada penelitian Buertey & Pae (2020) hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan dari ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *forward-looking* sehingga ukuran dewan komisaris yang besar tidak memengaruhi dalam pengungkapan *forward-looking information* yang tinggi.

Hasil penelitian Kılıç & Kuzey (2018), ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information* karena ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan penurunan kualitas informasi kepada pemangku kepentingan akibat dari kurangnya komunikasi dan koordinasi. Hasil penelitian Ajibola (2017) juga menunjukkan terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan antara ukuran dewan komisaris dan pengungkapan *forwardlooking information*, menurutnya ukuran dewan komisaris yang besar dapat membatasi tingkat pengungkapan karena faktor argumen yang tidak dapat dipertahankan dalam aktualisasi. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*

Proporsi Komisaris Independen dan Pengungkapan *Forward-Looking Information*

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris perusahaan yang tidak dipekerjakan oleh perusahaan (AgyeiMensah, 2017). Untuk mengurangi adanya risiko kolusi antara dewan komisaris dan manajemen, maka dewan komisaris diduduki oleh sejumlah anggota yang disebut komisaris independen, yaitu profesional yang bukan dari manajemen dan tidak memiliki hubungan bisnis atau kepemilikan dengan perusahaan.

Komisaris independen berfungsi untuk meningkatkan mekanisme *corporate governance*, untuk mencegah kerugian yang berdampak kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan keberadaan komisaris independen dapat mengurangi biaya agensi (Uyar & Kilic, 2012). Berdasarkan penelitian Buertey & Pae (2020) komisaris independen dapat mengurangi ketidakseimbangan informasi sehingga dapat mengurangi asimetri informasi dan membawa peningkatan dalam pengungkapan *forward-looking information*.

Pada penelitian Ajibola (2017) proporsi komisaris independen mempunyai pengaruh positif yang menunjukkan bahwa komposisi komisaris independen dapat meningkatkan efektivitas pemantauan sehingga akan mengarahkan kepada pengungkapan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian Al-Najjar & Abed (2014), proporsi komisaris independen tidak signifikan memengaruhi pengungkapan *forward-looking information* hal ini diakibatkan lemahnya peran komisaris independen di negara Inggris. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H2: Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*

Kepemilikan Publik dan Pengungkapan *Forward-Looking Information*

Jumlah saham publik menunjukkan besarnya *private information* yang harus disampaikan manajer kepada publik, sehingga semakin besar proporsi kepemilikan publik akan berakibat pada peningkatan pengungkapan informasi yang lebih banyak (Agustin & Oktavianna, 2019). Dalam penelitian Ajibola (2017), kepemilikan publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information* karena pada objek penelitian mayoritas dari kepemilikan saham dimiliki oleh internal perusahaan.

Penelitian Uyar dan Kilic (2012) menunjukkan hasil penelitian kepemilikan publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*. Hasil penelitian yang sama pada Mujiono & Nany (2010) dimana saham publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap luas pengungkapan dikarenakan objek penelitian yang dilakukan kepemilikan publik umumnya merupakan investor kecil sehingga tidak memiliki otoritas terhadap informasi keuangan dan nonkeuangan yang diinginkan. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H3: Kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan *forwardlooking information*

Proporsi Komite Audit Independen dan Pengungkapan *Forward-Looking Information*

Teori agensi memprediksikan keberadaan komite audit dapat mengurangi biaya agensi dengan membantu dewan komisaris melalui dalam pemantauan aktivitas manajemen dan kualitas audit. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Al-Najjar & Abed (2014) dimana proporsi komite audit independen berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

Dalam penelitian Ajibola (2017) proporsi komite audit independen memiliki pengaruh positif dengan tingkat signifikan yang rendah, mengartikan perusahaan yang memiliki komite audit independen akan

lebih cenderung mengungkapkan *forwardlooking information*. Semakin meningkatnya pelaksanaan *corporate governance* akan meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya *corporate governance*, hal ini menyebabkan proporsi komite audit independen mendekati homogen dan mengakibatkan tidak adanya perubahan yang berarti dalam proporsi ini sehingga hasil penelitian Mujiono & Nany (2010) menunjukkan pengaruh negatif. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H4: Proporsi komite audit independen berpengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*

Frekuensi Rapat Komite Audit dan Pengungkapan *Forward-Looking Information*

Frekuensi rapat komite audit merupakan metode dalam menyampaikan hasil pemantauan dari aktivitas pemantauan intensif dan semakin tinggi aktivitas frekuensi rapat komite audit akan membantu meningkatkan transparansi dalam laporan tahunan sehingga hasil penelitian Ajibola (2017) menunjukkan

pengaruh positif terhadap pengungkapan cenderung menyajikan lebih banyak *forward-looking information*.

Frekuensi rapat komite audit merupakan serupa juga pada penelitian Buertey & Pae (2020) indikator efektivitas kerja komite audit kualitas audit dari perusahaan yang diaudit oleh sehingga semakin sering pengadaaan rapat KAP *Big Four* berpengaruh positif dan signifikan komite audit akan mendorong intensitas terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

mendiskusikan isu-isu penting dan memecahkan masalah terkait dengan pengungkapan informasi perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Suyono & Eko (2018) menunjukkan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan perusahaan. Tetapi pada

Berdasarkan penelitian Ajibola (2017) kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan, karena ukuran KAP *Big Four* memiliki kredibilitas kualitas pelaporan informasi lebih dalam. KAP *Big Four* juga memiliki pengalaman yang unggul, mendapatkan pengakuan secara internasional

Ringkasan Sampel

No	Kriteria	Tahun			Total
		2017	2018	2019	
1.	Jumlah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2019	47	51	54	152
2.	Perusahaan yang tidak ditemukan data laporan tahunan selama 2017-2019	(2)	(3)	(3)	(8)
3.	Perusahaan yang tidak menggunakan satuan mata uang Rupiah.	0	0	0	0
4.	Perusahaan yang tidak memiliki periode laporan tahunan yang berakhir per 31 Desember	0	0	0	0
5.	Perusahaan yang tidak menyajikan data secara lengkap	(4)	(6)	(6)	(16)
6.	Sampel Outlier	(2)	(2)	(2)	(6)
	Total Sampel Penelitian/Observasi	39	40	43	122

penelitian Rafifah & Ratmono (2015) jumlah rapat komite audit tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan pengungkapan sukarela, dikarenakan kurang efektifnya rapat komite audit dalam pelaksanaannya. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H5: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*

Kualitas Audit dan Pengungkapan *Forward-Looking Information*

Auditor eksternal dipercaya dapat berperan secara independen dan profesional atas keandalan dan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan standar yang berlaku umum (Sari, Anugerah & Dwiningsih, 2010). Pada penelitian Uyar & Kilic (2012) ukuran auditor dari KAP *Big Four* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

dan menjaga reputasi baik mereka. Sehingga dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* dapat memberikan jaminan kepada investor bahwa pengungkapan *forward-looking information* memiliki informasi yang dapat dipercaya. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Rafifah dan Ratmono (2015) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela dikarenakan KAP indonesia berfokus dalam mengaudit laporan keuangan bukan laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan. Maka berdasarkan penelitian sebelumnya hipotesis yang dirumuskan yaitu:

H6 : *Kualitas* audit berpengaruh terhadap

Tabel 1.

pengungkapan *forward-looking information*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian verifikatif yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil dari perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four*

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sama merupakan poin penting yang ditekankan melalui alat analisis statistik. Populasi dalam oleh Botosan (1997) bahwa industri yang berbeda penelitian ini adalah perusahaan manufaktur menampilkan pola pengungkapan yang berbeda sektor industri barang konsumsi yang pula.

terdaftar di BEI dalam periode waktu 2017-2019 yang ada pada situs www.idx.co.id. (2018) lebih komprehensif karena memberikan Penelitian ini menggunakan data periode 2017-2019 karena pada periode tersebut kondisi pengungkapan secara kualitatif dan juga pasar modal relatif normal sebelum pandemi Covid-19. Pembatasan periode ini mengingat dan kuantitatif dalam indeks pengungkapan pandemi Covid-19 yang mulai melanda memiliki kelebihan karena lebih memungkinkan Indonesia sejak Maret 2020. bagi perusahaan untuk melaporkan pengungkapan PricewaterhouseCooper (PWC, 2020) *forward-looking information* dalam istilah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 tidak kualitatif daripada penyampaian secara hanya mendisrupsi kondisi keuangan kuantitatif, dimana hal ini terjadi karena perusahaan, namun juga mengubah secara mengingat adanya risiko litigasi.

signifikan pengungkapan perusahaan Berdasarkan daftar item tersebut, terutama yang berkaitan dengan masa depan keberadaan setiap item akan diukur dengan perusahaan. Dalam kondisi normal, kebijakan menetapkan nilai 1 dan untuk ketiadaan item pengungkapan perusahaan tampaknya tetap tersebut diungkapkan ditetapkan nilai 0, dan relatif sama dari waktu ke waktu (Botosan, kemudian menjumlahkan skor yang diperoleh 1997). Dengan demikian, karena penelitian ini dibagi dengan skor maksimum pengungkapan.

bertujuan untuk mengkaji dalam kondisi yang

dapat digeneralisasi, maka penelitian dilakukan pada periode tahun 2017-2019.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan jenis teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu untuk dijadikan sampel. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh sampel 122 observasi.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengungkapan *Forward-Looking Information*

Indeks pengungkapan *forward-looking information* (FLID) berdasarkan penelitian Kılıç & Kuzey (2018), dengan menggunakan pendekatan analisis untuk menyelidiki total kualitatif dan kuantitatif dari pengungkapan *forward-looking information* perusahaan. Dalam penelitian tersebut terdapat 30 item (bersifat kualitatif dan kuantitatif).

Pertimbangan yang mendasari penggunaan indeks Kılıç & Kuzey (2018) didasarkan apada dua hal. Pertama, adalah bahwa objek penelitian yang digunakannya adalah perusahaan manufaktur sehingga sampel penelitian tersebut sama dengan dua orang anggota. Jumlah komisaris independen penelitian ini. Kesamaan alat ukur untuk meneliti pengungkapan dalam sektor yang

Ukuran Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 6, dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Serta dewan komisaris memastikan bahwa perusahaan telah melakukan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan perusahaan (KNKG, 2006). Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yang tercantum dalam laporan tahunan (Qu, Ee, Liu, Wise & Carey, 2015).

Proporsi Komisaris Independen Keberadaan komisaris independen ini bertindak sebagai mekanisme kontrol saat mereka melakukan fungsi pengawasan secara independen (Agyei-Mensah, 2017). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris independen yang berasal dari luar emiten atau tidak mempunyai afiliasi dengan perusahaan dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris emiten. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 20, paling sedikit satu orang komisaris independen jika dewan komisaris terdiri dari dua orang, dan paling kurang 30% jika dewan komisaris lebih dari dua orang anggota. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai

dengan peraturan perundangundangan dan **Frekuensi Rapat Komite Audit** salah satu komisaris independen mempunyai Penyelenggaraan rapat komite audit dijelaskan latar belakang akuntansi atau keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (KNKG, 2006). 55/POJK.04/2015 bahwa komite audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit mengadakan rapat satu kali dalam tiga bulan dan

Kepemilikan Publik

Saham publik menunjukkan tingkat rapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih kepemilikan dari berapa jumlah lembar saham dari satu per dua jumlah anggota komite audit. perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat Pertemuan atau rapat komite audit berfungsi publik. Pengertian publik di sini adalah pihak sebagai media untuk melaksanakan berbagai individu diluar manajemen perusahaan dan perbaikan atau evaluasi yang dibutuhkan termasuk tidak memiliki hubungan istimewa dengan untuk memastikan kualitas dari laporan keuangan perusahaan sehingga dalam penelitian ini (Zulfikar, Nofianti & Faozy, 2019). Sehingga dalam variabel kepemilikan publik diukur dengan pelaksanaan tugasnya, antar anggota komite audit proporsi jumlah lembar saham yang dimiliki akan melakukan koordinasi dan membahas publik dibandingkan dengan jumlah lembar temuan-temuan dari pengawasan dan analisis saham beredar. Besarnya jumlah saham terkait laporan keuangan perusahaan ditawarkan kepada publik menunjukkan (Mutmainnah & Wardhani, 2013). Penelitian ini besarnya *private information* yang harus mengukur variabel rapat komite audit dengan dibagikan oleh manajer kepada masyarakat. jumlah rapat komite audit dalam satu tahun.

Private information adalah informasi yang

hanya diketahui oleh manajer, diantaranya **Kualitas Audit**

pengukuran kinerja perusahaan, perencanaan Kualitas audit akan memberikan keyakinan pada bonus, dan lainnya (Agustin & Oktavianna, pengguna laporan keuangan perusahaan. Kualitas 2019). Maka cara perusahaan membagikan audit dibedakan antara KAP (kantor akuntan informasi tersebut dengan mengungkapkan publik) besar dan KAP kecil, karena terdapat dalam laporan tahunan. perbedaan dari segi sumber daya dan teknologi

yang digunakan oleh masing-masing KAP (Pratiwi

Proporsi Komite Audit Independen Komite & Palupi, 2017). Sehingga KAP besar diyakini dapat audit independen merupakan anggota yang lebih memperhatikan pengungkapan yang berasal dari luar perusahaan atau anggota dilakukan oleh kliennya (Agyei-Mensah, 2017).

dewan komisaris yang tidak melakukan tugas-

Secara umum KAP dibedakan menjadi dua

tugas eksekutif dan terdiri paling sedikit tiga ukuran, yang pertama KAP berukuran besar anggota dan mayoritas harus independen dengan ruang lingkup global (*Big Four*) dan KAP

(Mujiono dan Nany, 2010). Komite audit berukuran kecil dengan ruang lingkup domestik diketuai oleh komisaris independen dan (*non Big Four*), KAP *Big Four* dipercaya lebih

anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan berkualitas dari pada KAP *non Big Four* sebab atau pelaku profesi dari luar perusahaan dan auditor dengan kemampuan dan kualitas yang

salah seorang anggota memiliki latar belakang tinggi akan menjaga reputasinya dengan kemampuan akuntansi atau keuangan (KNKG, memberikan kualitas audit yang tinggi pula (Sandy 2006). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa & Lukviarman, 2015). Variabel ini merupakan

Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 komite variabel *dummy*, dimana kualitas audit dibagi audit adalah komite yang dibentuk oleh dan menjadi dua kategori, kategori perusahaan yang

bertanggung jawab kepada dewan komisaris diaudit oleh KAP *Big Four* yang terdiri atas KAP dalam membantu melaksanakan tugas dan Deloitte Touche Tohmatsu, PWC

fungsi dewan komisaris. Adapun komposisi (PricewaterhouseCoopers), Ernst & Young, dan komite audit dalam perusahaan paling sedikit KPMG (Klynveld Peat Main Goerdeler) diberi nilai 1,

tiga anggota dengan mayoritas harus kategori perusahaan yang diaudit oleh KAP *non Big*

independen. Oleh sebab itu pengukuran yang *Four* akan diberi nilai 0.

digunakan dalam penelitian ini adalah

membandingkan jumlah komite audit yang **Ukuran Perusahaan**

berasal dari independen dengan jumlah total Penelitian ini menggunakan logaritma natural total anggota komite audit. aset sebagai variabel kontrol untuk ukuran

perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan upaya

penilaian skala besar atau kecilnya sebuah

perusahaan (Hutagalung, Tanjung & Basri, terhadap pengungkapan *forward-looking* 2018). Umumnya penelitian di Indonesia *information*.

ukuran perusahaan dapat dilakukan dengan

berbagai cara yaitu menggunakan total aset, **Profitabilitas (ROE)**

net sales, dan *market capitalization* (Fatmawati Variabel kontrol ketiga dalam penelitian ini adalah *et al.*, 2018). Salah satu tolak ukur yang profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan menunjukkan besar kecilnya perusahaan bagaimana kemampuan suatu perusahaan dalam adalah nilai aset perusahaan (Pratiwi dan menghasilkan laba, dan bertujuan untuk Palupi, 2017). memperlihatkan keuntungan perusahaan pada

Perusahaan yang berukuran besar suatu periode tertentu (Pratiwi dan Palupi, 2017).

membutuhkan kebutuhan pendanaan Penelitian ini memproyeksikan

eksternal yang lebih besar sehingga profitabilitas dengan *return on equity* (ROE) yang berdasarkan teori agensi konsekuensinya diukur dengan proporsi laba sebelum pajak

mereka harus mengungkapkan volume terhadap ekuitas. ROE digunakan untuk mengukur informasi sukarela yang lebih tinggi untuk efektivitas kemampuan manajer dalam mengelola

mendapatkan akses pendanaan eksternal yang modal perusahaan dalam menghasilkan lebih bersaing (Siagian & Ghozhali, 2012). keuntungan bagi seluruh pemegang saham

Perusahaan yang berukuran besar lebih disorot (Purbandani & Restuti, 2012).

dalam pasar modal sehingga memberi tekanan Berdasarkan teori pensinyalan, perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih akan lebih cenderung menunjukkan kualitas

lengkap dan banyak sebagai upaya mengurangi mereka kepada investor ketika profitabilitas biaya keagenan (Purbandani & Restuti, 2012). mereka tinggi, sehingga manajemen perusahaan

Oleh karena itu, ukuran perusahaan masuk ke akan lebih mengungkapkan informasi kepada dalam regresi untuk mengontrol pengaruhnya publik untuk memberi kesan positif (Agyei-

terhadap pengungkapan *forward-looking* Mensah, 2017). Oleh karena itu, profitabilitas

information. masuk ke dalam regresi untuk mengontrol pengaruhnya terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

Leverage

Rasio *leverage* dapat digunakan untuk

mengukur seberapa besar perusahaan **ANALISIS DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif**

bergantung pada utang dalam membiayai Tabel 2 menunjukkan hasil dari uji analisis asetnya (Muliawati & Rohman, 2019). Dalam statistik deskriptif perusahaan manufaktur sektor

penelitian ini ukuran yang digunakan untuk industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI

mengukur variabel kontrol *Leverage* adalah periode 2017-2019 dengan jumlah sampel total kewajiban dibagi dengan total aset sebanyak 122 perusahaan. Dari tabel tersebut

perusahaan (Alkhatib, 2014). *Leverage* dapat dilihat bahwa ukuran dewan komisaris menunjukkan kemampuan perusahaan untuk merupakan jumlah dari total komisaris termasuk

membayar kembali utang atau di dalamnya adalah komisaris independen. Ukuran kewajiban kewajibannya (Pratiwi & Palupi, dewan komisaris merupakan variabel independen

2017). yang diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris dari perusahaan

terhadap struktur modal perusahaan tersebut. Rentang antara ukuran dewan komisaris (Purbandani & Restuti, 2012). Perusahaan yang nilai minimum dari maksimum cukup jauh, nilai

memiliki proporsi utang lebih tinggi dalam minimum 2 orang dan nilai maksimum 8 orang. struktur modal akan membuat biaya keagenan Nilai rata-rata (*mean*) ukuran dewan komisaris

yang lebih tinggi (Mujiono & Nany, 2010). sebesar 3,9098 dan standar deviasi sebesar 1,4882. Sebagai respon perusahaan untuk mengurangi

biaya keagenan dengan mengungkapkan lebih Proporsi komisaris independen merupakan variabel independen yang diukur dengan rasio

banyak *forwardlooking information* dalam perbandingan komisaris independen dengan laporan tahunan mereka untuk menyampaikan banyaknya dewan komisaris perusahaan. Proporsi

informasi yang relevan dalam memenuhi komisaris independen dapat dikatakan cukup baik, kebutuhan kreditor (Aljifri *et al.*, 2013). Oleh mengingat nilai rata-rata (*mean*) Proporsi dewan

karena itu, *leverage* dimasukkan kedalam komisaris independen sebesar 42,02% mendekati regresi untuk mengontrol pengaruhnya 50% dan standar deviasi sebesar 12,86%. Adapun

nilai minimum dari proporsi komisaris independen 66 sebesar 25% dan nilai maksimum 100%.

Kepemilikan publik merupakan variabel independen yang menggambarkan persentase saham publik yang dimiliki publik. Nilai minimum dari kepemilikan publik sebesar 3,46% dan nilai maksimum 83,69%. Rentang angka minimum dan maksimum tersebut sangat jauh yang memperlihatkan besarnya variasi variabel kepemilikan publik. Adapun nilai rata-rata (*mean*) kepemilikan publik cukup rendah sebesar 23,758% dan standar deviasi sebesar 15,82193%.

Proporsi komite audit independen merupakan variabel independen yang diukur dengan rasio perbandingan jumlah komite audit independen dengan jumlah komite audit

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Ukuran Dewan Komisaris	122	2,000	8,000	3,909	1,488
Proporsi Komisaris Independen	122	0,250	1,000	0,420	0,128
Kepemilikan Publik	122	0,035	0,837	0,237	0,158
Proporsi Komite Audit Independen	122	0,750	1,000	0,993	0,038
Frekuensi Rapat Komite Audit	122	1,000	20,000	6,057	3,469
Kualitas Audit	122	0,000	1,000	0,377	0,486
Ukuran Perusahaan	122	24,490	32,200	28,408	1,713
<i>Leverage</i>	122	0,030	0,770	0,385	0,179
Profitabilitas	122	-0,290	1,400	0,146	0,271
<i>Forward looking information Disclosure</i>	122	0,100	0,670	0,430	0,101
Valid N (listwise)			122		

perusahaan. Nilai minimum dari proporsi komite audit independen sangat tinggi sebesar 75% dan nilai maksimum 100%, ini memperlihatkan tingkat variasi data yang cukup kecil. Adapun nilai rata-rata (*mean*) proporsi komite audit 99,39% dan standar deviasi sebesar 3,8888%.

Frekuensi rapat komite audit merupakan variabel independen yang menggambarkan jumlah rapat komite audit. Variasi data variabel frekuensi rapat komite audit cukup tinggi, hal ini terlihat dari cukup jauhnya rentang antara nilai minimum dari frekuensi rapat komite audit

Tabel 3.
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Dependen

No	Pengungkapan	Tingkat Pengungkapan
1	Iklan dan perencanaan publikasi (Kualitatif)	90,98%
2	Iklan dan perencanaan publikasi (Kuantitatif)	5,74%
3	Rencana pengeluaran modal (Kualitatif)	74,59%
4	Rencana pengeluaran modal (Kuantitatif)	14,75%
5	Arus kas yang diharapkan (Kualitatif)	49,18%
6	Arus kas yang diharapkan (Kuantitatif)	2,46%
7	Target laba (Kualitatif)	37,70%
8	Target laba (Kuantitatif)	28,69%
9	Risiko keuangan (Kualitatif)	98,36%
10	Risiko keuangan (Kuantitatif)	1,64%
11	Peluang pertumbuhan (Kualitatif)	98,36%
12	Peluang pertumbuhan (Kuantitatif)	21,31%
13	Risiko industri dan pasar (Kualitatif)	98,36%
14	Risiko industri dan pasar (Kuantitatif)	1,64%
15	Proyek investasi (Kualitatif)	70,49%
16	Proyek investasi (Kuantitatif)	9,02%
17	Pangsa pasar yang diharapkan (Kualitatif)	99,18%
18	Pangsa pasar yang diharapkan (Kuantitatif)	18,03%
19	Risiko politik (Kualitatif)	91,80%
20	Risiko politik (Kuantitatif)	6,56%
21	Penelitian dan pengembangan produk yang direncanakan (Kualitatif)	95,08%
22	Penelitian dan pengembangan produk yang direncanakan (Kuantitatif)	14,75%
23	Profitabilitas yang diharapkan (Kualitatif)	35,25%
24	Profitabilitas yang diharapkan (Kuantitatif)	13,11%
25	Target penjualan (Kualitatif)	72,13%
26	Target penjualan (Kuantitatif)	47,54%
27	Harga saham (Kualitatif)	7,38%
28	Harga saham (Kuantitatif)	1,64%
29	Risiko lingkungan (Kualitatif)	85,25%
30	Risiko lingkungan (Kuantitatif)	0%

adalah 1 kali dan nilai maksimum adalah 20 kali rapat. Nilai rata-rata (*mean*) frekuensi rapat komite audit sebesar 6,0574 dan standar deviasi sebesar 3,46958.

Kualitas audit merupakan variabel independen dengan rata-rata (*mean*) 0,377 dengan standar deviasi sebesar 0,48665. *Leverage* merupakan variabel kontrol dengan rata-rata (*mean*) 0,3855 dan standar deviasi sebesar 0,17922. Profitabilitas nilai 1 dan non *Big Four* diberi nilai 0, dimana merupakan variabel kontrol yang menggunakan

2017 2018 2019
 logaritma natural. Nilai minimum dari ukuran perusahaan sebesar 24,49 dan nilai maksimum 32,2. Nilai rata-rata (*mean*) ukuran perusahaan sebesar 28,408 dan standar deviasi sebesar 1,71344. *Leverage* merupakan variabel kontrol dengan total utang dibagi dengan total aset perusahaan. Nilai minimum dari *leverage* sebesar 0,03 dan nilai maksimum 0,77.

Tabel 5. Hasil Uji

Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	0,735	0,246	
Ukuran Dewan Komisaris	0,018	0,008	0,034 **
Proporsi Komisaris Independen	-0,070	0,075	0,354
Kepemilikan Publik	-0,001	0,001	0,242
Proporsi Komite Audit Independen	-0,687	0,231	0,004 ***
Frekuensi Rapat Komite Audit	0,008	0,002	0,003 ***
Kualitas Audit	-0,010	0,025	0,692
Ukuran Perusahaan	0,011	0,007	0,114
<i>Leverage</i>	0,012	0,051	0,821
Profitabilitas	0,027	0,037	0,470
<i>R square</i>	0,265		
<i>Adj. R Square</i>	0,206		
F	4,498		0,000
N	122		

Variabel ini merupakan variabel dummy, pada Nilai rata-rata (*mean*) *leverage* sebesar 0,3855 dan sampel yang diaudit oleh KAP *Big Four* diberi standar deviasi sebesar 0,17922. Profitabilitas nilai 1 dan non *Big Four* diberi nilai 0, dimana merupakan variabel kontrol yang menggunakan dari 122 sampel yang diamati terdapat 46 pengukuran rasio ROE dengan membandingkan sampel yang diaudit oleh KAP *Big Four* dan 76 laba bersih dengan total ekuitas. Nilai rata-rata sampel diaudit oleh KAP non *Big Four*. (*mean*) profitabilitas sebesar 0,1468 dan standar deviasi sebesar 0,27187.

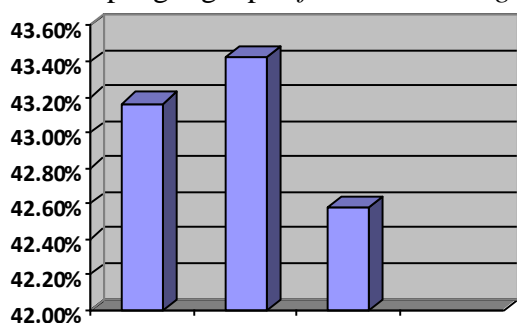
Ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol pertama dalam penelitian ini yang diukur dengan proksi total aset perusahaan dengan menggunakan

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan rata-rata persentase perusahaan dalam melakukan pengungkapan *forward-looking information* pada sampel penelitian ini adalah 43,07%, dimana persentase terendah sebesar 10% dan tertinggi sebesar 67%. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan *forward-looking information* masih tergolong rendah pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019.

Pengungkapan *forward looking information* sebagai variabel dependen memiliki nilai minimum 0,1 atau 10% dan nilai maksimum 0,67 atau 67%. Pengungkapan *forward looking information* diukur dengan indeks pengungkapan *forward looking information*. Nilai rata-rata (*mean*) pengungkapan

Gambar 1.

Tren pengungkapan *forward-looking*



forward looking information sebesar 43,07% terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019. dan standar deviasi dari pengungkapan Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan *forward looking information* 10,196%.

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis tinggi sebesar 73,61% dibandingkan penyampaian statistik deskriptif dari tingkat pengungkapan pengungkapan secara kuantitatif sebesar 12,46%. *forward-looking information* per item Hal ini menandakan perusahaan dalam pengungkapan pada 122 sampel perusahaan penyampaian pengungkapan *forwardlooking* manufaktur sektor industri barang konsumsi *information* lebih menyukai menyampaikan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode informasi secara kualitatif, yang mana hal ini 2017-2019. Tingkat pengungkapan *forward-* sejalan dengan adanya risiko litigasi.

looking information tertinggi yaitu pada item

Regresi Linear Berganda

dengan penyampaian secara kualitatif sebesar Sebelum melakukan analisis regresi linear 99,18%. Tingkat pengungkapan tertinggi berganda, penelitian ini terlebih dahulu melalui uji lainnya dengan tingkat pengungkapan sebesar normalitas dan uji asumsi klasik yang terdiri dari 98,36% yaitu pada item pengungkapan peluang uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan pertumbuhan, risiko keuangan, dan risiko autokorelasi. Hasil uji uji normalitas data industri dan pasar yang mana penyampaian penelitian ini telah terdistribusi normal, terlihat pengungkapan secara kualitatif.

Berdasarkan keseluruhan item sig. berada diatas 0,05 yakni 0,200. Uji pengungkapan terdapat item pengungkapan multikolinearitas data penelitian ini menunjukkan yang tidak diungkapkan oleh perusahaan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* manufaktur sektor industri barang konsumsi lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF menunjukkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tidak lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan 2017-2019 yaitu item pengungkapan risiko model regresi pada penelitian ini tidak terjadi lingkungan yang penyampaian pengungkapan multikolinearitas.

Selanjutnya, uji dalam bentuk kuantitatif. Untuk penyampaian heteroskedastisitas juga disimpulkan tidak terjadi pengungkapan *forward-looking information* heteroskedastisitas dalam model regresi, dan nilai terendah sebesar 1,64% yaitu pada item Durbin Watson pada penelitian ini sebesar 2,020 pengungkapan risiko keuangan, risiko industri memperlihatkan bahwa tidak terjadinya dan pasar, dan harga saham yang mana autokorelasi.

penyampaian pengungkapan dalam bentuk Tabel 5 memperlihatkan koefisien untuk kuantitatif. Item pengungkapan terendah persamaan regresi dari penelitian ini. Maka model lainnya yaitu item pengungkapan secara regresi linear berganda yang diperoleh ialah:

kuantitatif arus kas yang diharapkan sebesar $FLID = 0,735 + 0,018UDK - 0,070PKI - 0,001KP - 2,64\%$

$0,687PKAI + 0,008FRKA - 0,010KA + 0,011FS + 0,012LEV + 0,027PRFT + \epsilon$

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bagaimana tren dari pengungkapan *forward-* Keterangan: α : Konstanta; UDK : Ukuran Dewan *looking information* dalam periode tahun 2017- Komisariss; PKI: Proporsi Komisariss Independen; 2019 pada 122 sampel perusahaan manufaktur KP : Kepemilikan Publik; PKAI: Proporsi Komite sektor industri barang konsumsi yang Audit Independen; FRKA: Frekuensi Rapat Komite terdaftar di BEI. Pada tahun 2017 dengan 39 Audit; KA: Kualitas Audit; FS: Ukuran Perusahaan; sampel perusahaan tingkat pengungkapan LEV:

forward-looking information pada tahun ini *Leverage*; PRFT = Profitabilitas; ϵ = error

sebesar 43,16%, lalu terjadi peningkatan 0,26% Berdasarkan pengujian hipotesis pertama pada tahun 2018 dengan 40 sampel tingkat (H1) variabel ukuran dewan komisaris (UDK) pengungkapan pada tahun ini sebesar 43,42%, memiliki nilai t hitung sebesar 2,143 > 1,98157 dan dan terjadi penurunan 0,86% pada tahun 2019 tingkat signifikansi 0,034 < 0,05. Berdasarkan hasil dengan 43 sampel perusahaan pada tahun ini tersebut menunjukkan secara parsial ukuran tingkat pengungkapan sebesar 42,56% dewan komisaris berpengaruh positif dan

Tabel 4 menunjukkan tingkat signifikan terhadap pengungkapan *forward-* penyampaian pengungkapan *forwardlooking looking information* sehingga hipotesis (H1) *information* secara kuantatif dan kualitatif diterima. Dengan kata lain, berdasarkan hasil uji pada 122 sampel perusahaan manufaktur hipotesis dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sektor industri barang konsumsi yang jumlah anggota dewan komisaris maka akan

berdampak signifikan terhadap peningkatan sehingga t hitung berada pada bagian daerah tolak pengungkapan *forwardlooking information*. dan tingkat signifikansi $0,242 > 0,5$. Berdasarkan Temuan dari hasil penelitian ini sesuai dengan hasil tersebut menunjukkan kepemilikan publik penelitian Agyei-Mensah (2017) tetapi tidak (KP) tidak berpengaruh signifikan terhadap sejalan dengan penelitian Ajibola (2017), pengungkapan *forward-looking information* Buertey & Pae (2020) dan Kilic & Kuzey (2018). sehingga hipotesis (H3) ditolak. Hal ini diduga Dari temuan ukuran dewan komisaris yang karena besar kepemilikan publik pada perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap yang ada pada data penelitian terlalu memiliki pengungkapan *forward-looking information*, variasi data dan juga sebagian besar perusahaan menjelaskan semakin besar ukuran dewan memiliki persentase kepemilikan publik yang komisaris yang mana memiliki fungsi rendah sehingga hal ini berkemungkinan membuat mengawasi (*supervisory*) dan menasehati perusahaan tidak ingin untuk memberikan banyak (*advisory*) dapat meningkatkan efektivitas *private information* kepada publik. Hasil penelitian jalannya *corporate governance* sehingga akan ini tidak sesuai dengan penelitian Ajibola (2017), meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Uyar & Kilic (2012), dan Mujiono & Nany (2010) terkait pengungkapan yang dalam hal ini yang menunjukkan hasil penelitian berpengaruh ditujukan pada pengungkapan *forward-* negatif terhadap pengungkapan *forwardlooking looking information*. *information*, dan juga penelitian Agustin &

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua Oktavianna (2019) yang menunjukkan pengaruh (H2) variabel proporsi komisaris independen positif antara kepemilikan publik dan (PKI) memiliki nilai t hitung sebesar $-0,930 > -$ pengungkapan sukarela.

$1,98157$ sehingga t hitung berada pada bagian Berdasarkan pengujian hipotesis keempat daerah tolak dan tingkat signifikansi $0,354 > (H4)$ variabel proporsi komite audit independen $0,5$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan (PKAI) memiliki nilai t hitung sebesar $-2,990 < -$ proporsi komite audit independen (PKAI) tidak $1,98157$ dan tingkat signifikansi $0,004 < 0,05$. berpengaruh signifikan terhadap Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan proporsi pengungkapan *forward-looking information* komite audit independen berpengaruh negatif dan sehingga hipotesis (H2) ditolak. Hal ini diduga signifikan terhadap pengungkapan *forward-* karena independensi dewan komisaris dalam *looking information*. Sehingga hipotesis (H4) efektivitas pelaksanaan tugasnya bergantung diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan pada sistem dan budaya bisnis perusahaan, penelitian Mujiono & Nany (2010) yang dengan kemungkinan dewan komisaris menunjukkan pengaruh negatif antara proporsi independen belum memiliki peran yang kuat komite audit independen dengan pengungkapan sehingga kebanyakan keputusan berasal dari *forward-looking information*. Hal ini dikarenakan internal perusahaan. Hal lainnya yang meningkatnya kepatuhan terhadap menyebabkan komisaris independen tidak penyelenggaraan *corporate governance* sehingga berpengaruh signifikan dalam pengungkapan menyebabkan proporsi komite audit independen *forward-looking information* kemungkinan semakin mendekati homogen dan mengakibatkan disebabkan karena keberadaan proporsi tidak adanya perubahan yang berarti dalam komisaris independen dalam suatu proporsi komite audit independen. Hasil penelitian perusahaan hanya sebatas untuk memenuhi ini tidak sejalan dengan penelitian Ajibola (2017) syarat dari regulasi. Hasil penelitian ini sesuai dan Al-Najjar & Abed (2014).

dengan penelitian AlNajjar & Abed (2014) Berdasarkan pengujian hipotesis kelima (H5) tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian variabel frekuensi rapat komite audit memiliki Rafifah & Ratmono (2015) dengan hasil nilai t hitung sebesar $3,049 > 1,98157$ dan tingkat penelitian proporsi komite audit independen signifikansi $0,003 < 0,05$. Berdasarkan hasil berpengaruh negatif Sedangkan pada tersebut menunjukkan frekuensi rapat komite penelitian Ajibola (2017) dan Buertey & Pae audit (FRKA) berpengaruh positif dan signifikan (2020) menunjukkan hasil penelitian yang terhadap pengungkapan *forward-looking* berpengaruh positif antara proporsi komisaris *information*. Sehingga hipotesis (H5) diterima. independen dengan pengungkapan *forward-* Dengan kata lain berdasarkan hasil uji hipotesis *looking information*. dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya

Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga frekuensi rapat komite audit maka akan (H3) variabel kepemilikan publik (KP) memiliki berdampak signifikan terhadap peningkatan nilai t hitung sebesar $-1,176 > 1,98157$ pengungkapan *forward-looking information*. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian Ajibola (2017) dan Suyono (2018), sedangkan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dengan penelitian Al-Najjar & Abed (2014), Buerthey Rafifah dan Ratmono (2015) bahwa frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

Berdasarkan hasil temuan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dalam penelitian ini, yang diukur dengan rasio terhadap pengungkapan *forward-looking information*, menjelaskan semakin banyak total aset perusahaan. Berdasarkan hasil uji frekuensi rapat komite audit dapat menjadi statistik t pada tabel 4.9, variabel kontrol *leverage* media dalam efektivitas tugas komite audit memiliki nilai t hitung sebesar $1,227 < 1,98157$ terutama sebagai wadah untuk melakukan sehingga t hitung berada pada bagian daerah tidak transparansi laporan tahunan. Semakin banyak berpengaruh dengan tingkat signifikansi $0,821 > 0,5$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan meningkatkan pengawasan dan evaluasi dari bahwa variabel kontrol *leverage* tidak memiliki kualitas informasi yang disampaikan dalam pengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan yang akan berdampak pada *forward-looking information*. Hal ini kemungkinan peningkatan pengungkapan *forward-looking information* disebabkan pengungkapan *forward-looking information* tidak berpengaruh dalam keputusan

Berdasarkan pengujian hipotesis keenam kreditor dalam pertimbangan pemberian (H6) variabel kualitas audit (KA) memiliki nilai pinjaman. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan t hitung sebesar $-0,398 < 1,98157$ sehingga t penelitian Buerthey & Pae (2020), Mujiono & Nany hitung berada pada bagian daerah tolak dan (2010), dan Ajibola (2017) yang menyimpulkan tingkat signifikansi $0,692 > 0,5$. Berdasarkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap hasil tersebut menunjukkan kualitas audit pengungkapan *forward-looking information*.

tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (PRFT) merupakan variabel pengungkapan *forward-looking information* kontrol dalam penelitian ini, yang diukur dengan sehingga hipotesis (H6) ditolak. Hasil ini sesuai rasio *Return On Equity* dengan penelitian Rafifah & Ratmono (2015). (ROE). Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel Hal ini diduga karena KAP hanya melakukan 4.9, variabel kontrol profitabilitas memiliki nilai t hitung sebesar $0,726 < 1,98157$ sehingga t hitung berada pada bagian daerah tidak berpengaruh bukan laporan tahunan perusahaan. Hasil dengan tingkat signifikansi $0,470 > 0,5$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sesuai dengan Uyar & Kilic (2012), Buerthey & Pae (2020) dan Ajibola (2017) yang menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *forward-looking information*. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya variasi pengungkapan *forward-looking information* tidak dipengaruhi oleh total laba bersih tahun berjalan yang dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Agyei-Mensah (2017) dan Uyar & Kilic (2012) dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

Ukuran perusahaan (FS) merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, yang diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan.

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.9, variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar $1,594 < 1,98157$ sehingga t hitung berada pada bagian daerah tidak berpengaruh dengan tingkat signifikansi $0,114 > 0,5$. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *forward-looking information*.

Hal ini diduga ukuran perusahaan yang besar berkemungkinan enggan untuk melakukan pengungkapan *forward-looking information* karena memiliki tekanan risiko litigasi yang

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah dilakukan maka kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *forward-*

looking information; (2) Proporsi komisaris variabel kompensasi dewan komisaris, frekuensi independen tidak berpengaruh signifikan rapat dewan komisaris yang mana frekuensi rapat terhadap pengungkapan *forward-looking* dewan komisaris lebih memiliki keberagaman data *information*; (3) Kepemilikan publik tidak dan juga menghitung berapa banyak dewan berpengaruh signifikan terhadap komisaris yang mempunyai latar belakang pengungkapan *forward-looking information*; akuntansi. Untuk mewakili efektivitas kinerja (4) Proporsi komite audit independen komite audit dapat mempertimbangkan ukuran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komite audit, karena lebih mempunyai data yang pengungkapan *forward-looking information*; bervariasi. Untuk mewakili struktur kepemilikan (5) Frekuensi rapat komite audit berpengaruh peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan positif dan signifikan terhadap pengungkapan pengaruh kepemilikan keluarga, manajerial, dan *forward-looking information*; (6) Kualitas institusional yang mana struktur kepemilikan ini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap lebih dominan daripada kepemilikan publik. pengungkapan *forward-looking information*.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan penelitian ini adalah Pertama, penelitian ini terbatas pada periode sebelum pandemic Covid-19. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengungkapan *forward-looking information* pada periode pandemi Covid-19. Hal ini dapat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman mengenai pola pengungkapan perusahaan pada periode yang khusus sebagaimana sejumlah penelitian dilakukan khusus pada periode krisis ekonomi dan membandingkan pola pengungkapan pada periode pandemic dengan pola pengungkapan pada kondisi normal.

Kedua, penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan *forward-looking information* berdasarkan indeks item pengungkapan berasal dari penelitian di luar negeri dan belum disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat merujuk pada indeks pengungkapan *forward-looking information* yang dirumuskan di Indonesia.

Ketiga, penelitian ini menggunakan pengukuran pengungkapan *forwardlooking information* berdasarkan indeks pengungkapan. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji penggunaan metode pengukuran selain indeks. Sebagai contoh pengukuran pengungkapan *forward-looking information* yang menggunakan sistem pengkodean untuk mencari kata kunci sebagaimana pada penelitian Abed & Robers (2011) yang dikembangkan oleh Abed, Al-Najjar & Roberts (2014).

Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain dalam mewakili mekanisme *corporate governance* seperti dalam mewakili efektivitas kinerja dari dewan komisaris dapat mempertimbangkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abed, S., Al-Najjar, B., & Roberts, C. (2016). Measuring annual report narratives disclosure: Empirical evidence from forward-looking information in the UK prior the financial crisis. *Managerial Auditing Journal*, 31(4-5), 338-361. <https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2014-1101>
- Agustin, H.E., & Oktavianna, R. (2019). Pengaruh porsi kepemilikan publik, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran kap terhadap pengungkapan sukarela. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 093.
- Agyei-Mensah, B.K. (2017). The relationship between corporate governance, corruption and forward-looking information disclosure: a comparative study. *Corporate Governance (Bingley)*, 17(2), 284-304.
- Ajibola, J. (2017). Corporate governance attributes as correlates of disclosure of forward-looking information on the Nigerian Stock Exchange. *World Journal of Finance and Investment Research*, 2(1), 1-15.
- Al-Najjar, B., & Abed, S. (2014). The association between disclosure of forward-looking information and corporate governance mechanisms: Evidence from the UK before the financial crisis period. *Managerial Auditing Journal*, 29(7), 578-595.
- Aljifri, K., & Hussainey, K. (2007). The determinants of forward-looking information in annual reports of UAE companies. *Managerial Auditing Journal*, 22(9), 881-894.
- Aljifri, K., Hussainey, K., & Oyelere, P. (2013). The determinants of forwardlooking disclosure: A corporate governance perspective.

- Corporate Ownership and Control*, 10(2 Kılıç, M., & Kuzey, C. (2018). Determinants of forward-looking disclosures in integrated reporting. *Managerial Auditing Journal*, 33(1), 115-144.
- Alkhatib, K. (2014). The determinants of forward-looking information disclosure. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109, 858-864.
- Botosan, C.A. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital: South African Evidence. *The Accounting Review*, 72(3), 323-349.
- Buertey, S., & Pae, H. (2020). Corporate Governance and Forward-Looking Information Disclosure: Evidence from a Developing Country. *Journal of African Business*, 22(3), 293-308.
- Choi, F.D., & Meek, G.K. (2008). *International accounting, 6th edition*. Pearson.
- Dzaraly, M., Lokman, N., & Othman, S. (2018). Corporate governance mechanisms and voluntary disclosure of strategic and forward looking information in annual reports. *International Journal of Accounting, Finance and Business*, 3(15), 86-104.
- Endres, D., & PricewaterhouseCoopers, L. L. P. (2007). The determination of corporate taxable income in the EU member states.
- Fatmawati, R., Astuti, D.W., & Suhardjanto, D. (2018). Peran corporate governance dalam meningkatkan voluntary disclosure. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 57-69.
- Hassanein, A., & Hussainey, K. (2015). Is forward-looking financial disclosure really informative? Evidence from UK narrative statements. *International Review of Financial Analysis*, 41, 52.
- Hutagalung, F.D., Tanjung, A.R., & Basri, Y.M. (2018). The influence of institutional ownership, public ownership, investment opportunity set (ios), and company size on quality of earnings: Voluntary disclosure as the intervening variable. *Bilancia*, 2 (1), 73-84.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Kompas.com. (2018). Tumbuh 44 persen jumlah investor pasar modal di 2018 capai 16 juta. Diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/>
- Lukviarman, N. (2004). Etika bisnis tak berjalan di Indonesia: Ada apa dalam corporate governance? *Jurnal Siasat Bisnis*, 2(9), 139-156.
- Maghfira, A., & Tresnaningsih, E. (2018). An analysis of forward-looking disclosures, corporate governance and the ability to anticipate future earnings: Empirical evidence from Indonesia. 55(Iac 2017), 130-135.
- Mardani, A., & Kristanto, A.B. (2020). Karakteristik direksi dan pengungkapan informasi berwawasan masa depan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Menicucci, E. (2013). Firms' characteristics and forward-looking information in management commentaries of Italian listed companies. *African Journal of Business Management* 7(17), 1667- 1674.
- Mujiono, M., & Nany, M. (2010). Pengaruh leverage, saham publik, size dan komite audit terhadap luas pengungkapan sukarela. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(2), 129-134.
- Muliawati, A. C., & Rohman, A. (2019). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap ketepatan dan keakuratan pengungkapan forward-looking information. *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1-15.
- Mutmainnah, N., & Wardhani, R. (2013). Analisis dampak kualitas komite audit terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 147-170.
- Nugraheni, B.D. (2018). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 16(3), 352-367.
- Oktriani, R., & Arza, F.I. (2018). Pengaruh listing age dan ownership dispersion terhadap luas pengungkapan sukareka dengan firm size sebagai variabel pemoderasi (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016). *Wahana Riset Akuntansi*, 6(2), 1255.
- Pratiwi, M.W., & Palupi, A.F. (2017). Analisis pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, umur perusahaan, difusi kepemilikan,

- profitabilitas, leverage, dan tingkat pertumbuhan terhadap tingkat pengungkapan segmen operasi. *Media Riset Akuntansi*, 5(1), 1-11.
- Purbandani, E., & Restuti, M.D. (2012). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela melalui internet pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012*.
- Qu, W., Ee, M. S., Liu, L., Wise, V., & Carey, P. (2015). Corporate governance and quality of forward-looking information: Evidence from the Chinese stock market. *Asian Review of Accounting*, 23(1), 39-67.
- Rafifah, U.R., & Ratmono, D. (2015). Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap pengungkapan sukarela laporan tahunan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4 (3), 475-487.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19 (2), 85-98.
- Sari, R.N., Anugerah, R., & Dwiningsih, R. (2010). Pengaruh struktur kepemilikan, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap transparansi informasi. *Pekbis Jurnal*, 2(3), 326-335.
- Scott, W.R., & O'Brien, P.C. (2019). *Financial accounting theory* (8th ed.). Prentice Hall.
- Setiawan, A. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sukarela pada bank umum di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 1(1), 90.
- Siagian, G.E., & Ghozhali, I. (2012). Pengaruh struktur dan aktivitas good corporate governance terhadap luas pengungkapan informasi strategis secara sukarela pada website perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 189-199.
- Sunyoto, & Hidayanti, E. (2009). Pentingnya pengungkapan laporan keuangan dalam meminimalisasi asimetri informasi. *Jurnal WIG*, 4(2), 19-28.
- Suyono, & Eko. (2018). Peran Komite audit dalam meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan : Bukti empiris di bursa efek negaranegara teluk. *Jurnal Visioner & Strategis*, 7(1), 7-16.
- Utami, W., & Wahyuni, P.D. (2018). Forwardlooking information based on integrated reporting perspective: Value relevance study in Indonesia Stock Exchanges. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 8(4), 1-12.
- Utami, W., Wahyuni, P.D., & Nugroho, L. (2020). Determinants of stock liquidity: Forward-looking information, corporate governance, and asymmetric information. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(12), 795-807.
- Uyar, A., & Kilic, M. (2012). Influence of corporate attributes on forwardlooking information disclosure in publicly traded Turkish Corporations. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 62, 244-252.
- Zulfikar, R., Nofianti, N., & Faozy, A.N. (2019). Pengaruh komisaris independen dan karakteristik komite audit terhadap internet financial reporting disclosure. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 15(2), 9-17.